

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Penyusunan RKPDes Partisipatif di Desa Wangandalem, Kabupaten Brebes

Sanusi Sanusi

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

Email Korespodensi: sanusi@upstegal.ac.id

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan indikator penting tata kelola yang inklusif, namun di banyak desa, termasuk Desa Wangandalem, Kabupaten Brebes, partisipasi warga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) masih bersifat formal dan belum mencerminkan kebutuhan masyarakat secara substantif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas partisipatif masyarakat dan aparatur desa melalui pendampingan penyusunan RKPDes berbasis kolaborasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-kolaboratif dengan fasilitasi musyawarah desa, pelatihan teknis penyusunan RKPDes, pemetaan potensi desa berbasis komunitas, dan diskusi kelompok terfokus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan kelompok perempuan, pemuda, dan pelaku UMKM, berkurangnya dominasi elit lokal dalam forum musyawarah, serta meningkatnya akurasi data potensi desa melalui keterlibatan aktif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDes). Draft RKPDes yang dihasilkan lebih representatif dan kontekstual, mencakup prioritas baru seperti pengembangan pertanian organik, pelatihan UMKM, dan infrastruktur dasar. Kegiatan ini juga memperkuat kapasitas hukum dan teknis warga desa melalui peran akademisi sebagai fasilitator dan katalisator perubahan sosial. Kesimpulannya, model pendampingan partisipatif tidak hanya memperbaiki kualitas dokumen perencanaan desa, tetapi juga mendorong budaya musyawarah yang lebih demokratis serta berpotensi menciptakan keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan di tingkat lokal.

Catatan Artikel


Dikirim: 03 Agustus 2025

Direvisi: 20 September 2025

Diterima: 31 September 2025

Kata Kunci

RKPDes, Partisipasi, Pemberdayaan, Pendampingan, Desa.

 <https://doi.org/10.69812/jpn.v2i3.154>

Artikel akses terbuka di bawah [CC-BY-SA License](#).



Pendahuluan

Dalam strategi pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan komponen penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, berpartisipasi, dan berkelanjutan. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dapat merencanakan dan menerapkan pembangunan melalui mekanisme perencanaan berbasis partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem tersebut.

Namun, pelibatan masyarakat dalam proses ini masih bersifat formalitas di banyak tempat, termasuk Desa Wangandalem. Dana Desa pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong partisipasi dan memperkuat masyarakat selama proses perencanaan serta pertanggungjawaban pembangunan desa (Provinsi Brebes, 2018; Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020). Oleh karena itu, RKPDes seharusnya berfungsi sebagai media terbuka dan berkelanjutan bagi warga desa untuk mengkomunikasikan kebutuhan, potensi, dan aspirasi pembangunan.

Desa Wangandalem terletak di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan potensi ekonomi yang bergantung pada pertanian dan usaha kecil. Namun demikian, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan RKPDes masih rendah dan tidak merata,

terutama dari kalangan perempuan, pemuda, dan pelaku ekonomi lokal. Data yang dikumpulkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Brebes pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30 hingga 40% peserta Musyawarah Desa (Musdes) benar-benar mewakili aspirasi warga, sementara sisanya didominasi aparat desa dan tokoh masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum dapat berpartisipasi penuh dalam diskusi strategis yang berkontribusi pada pengambilan keputusan pembangunan desa (Dinas PMD Kabupaten Brebes, 2023).

Masalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes tidak hanya terjadi di Kabupaten Brebes. Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan perencanaan partisipatif masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas masyarakat, kekurangan informasi, dan dominasi elit lokal dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian di Desa Gandaria, Gorontalo, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tinggi dapat memberikan pendampingan teknis yang berpotensi meningkatkan partisipasi warga dan pemahaman tentang pentingnya dokumen perencanaan desa (Rohandi & Husain, 2022).

Fenomena ini diperkuat oleh temuan penelitian lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa di tingkat nasional masih cenderung pasif, dengan warga lebih banyak berperan sebagai pelengkap administratif daripada pengambil keputusan (Sakir, 2024). Ketidakjelasan, dominasi kelompok tertentu, dan ketidaksepakatan warga menyebabkan pemberdayaan berbasis Dana Desa kurang efektif (Siribun et al., 2024). Di Desa Krangkong, Bojonegoro, RKPDes yang difasilitasi secara sistematis terbukti lebih inklusif dan mampu melibatkan kelompok rentan (Megawati et al., 2024).

Selain itu, pemetaan potensi desa berbasis komunitas menjadi aspek penting dalam menciptakan program pembangunan prioritas (Kartikawati et al., 2024). Studi di Desa Popisi, Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan terstruktur dapat meningkatkan kemampuan perangkat desa serta ruang partisipasi masyarakat (Amane et al., 2023). Sebaliknya, penelitian lain menekankan bahwa keterbukaan dalam proses musyawarah serta interaksi setara antara aparat desa dan warga sangat menentukan keberhasilan penyusunan RKPDes (Rahmah et al., 2024).

Meskipun banyak penelitian menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes, sebagian besar hanya menekankan aspek teoritis atau deskriptif dari proses perencanaan. Masih sedikit penelitian yang menelaah model pendampingan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks desa-desa di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Brebes. Belum ada penelitian yang secara mendalam mengevaluasi efektivitas pendekatan pendampingan berbasis komunitas dalam mengatasi kendala struktural yang membatasi partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan RKPDes. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab celah pengetahuan tersebut (Gap penelitian).

Berdasarkan observasi lapangan dan diskusi dengan mitra, pemerintah Desa Wangandalem menghadapi sejumlah permasalahan utama, di antaranya rendahnya keterampilan teknis aparat desa dalam memfasilitasi Musdes, tidak adanya dokumentasi potensi desa yang akurat, serta ketiadaan sistem pelibatan warga berbasis data. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran strategis RKPDes dalam menentukan arah pembangunan desa menyebabkan partisipasi mereka di forum Musdes masih terbatas.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan membantu masyarakat dan pemerintah Desa Wangandalem melalui pelatihan teknis, fasilitasi Musdes partisipatif, serta pemetaan potensi desa berbasis komunitas. Dalam pendekatan ini, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berperan sebagai fasilitator lokal untuk memastikan adanya keterlibatan aktif warga. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dokumen RKPDes serta memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam merancang pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

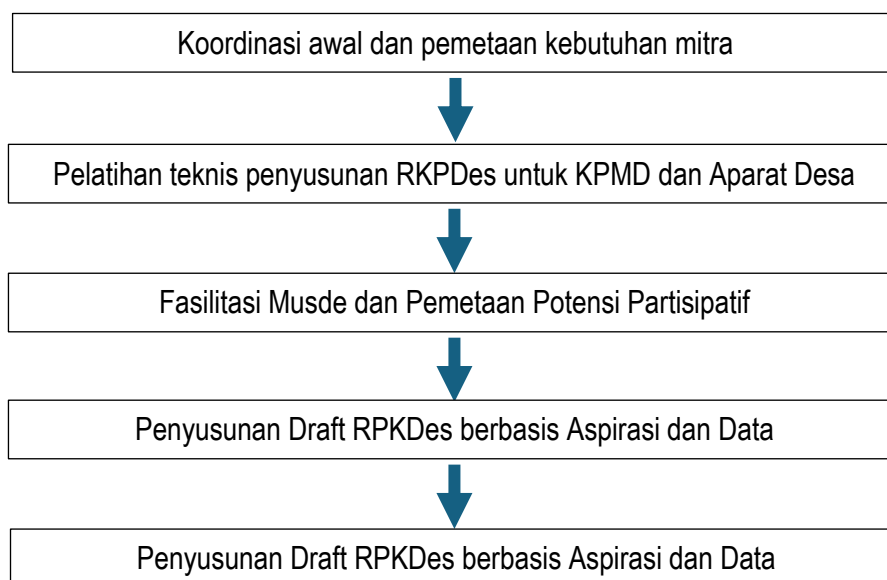
Secara khusus, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan gambaran mengenai metode pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan penyusunan RKPDes partisipatif di Desa Wangandalem, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat dan kualitas dokumen perencanaan. Hasil kegiatan diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi literatur pembangunan partisipatif di tingkat desa serta menawarkan implikasi praktis bagi tata kelola

pembangunan yang berorientasi kebutuhan lokal. Selain itu, hasil ini juga berpotensi mendukung kebijakan pemerintah daerah dan lembaga pendamping desa dalam merancang intervensi serupa di wilayah lain.

Metode

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif-kolaboratif melalui pendekatan pendampingan aktif. Pendekatan ini menggabungkan pemetaan potensi berbasis data, musyawarah desa, dan pelatihan teknis (Chambers, 1997). Pendekatan pendampingan partisipatif (Participatory Rural Appraisal-PRA) mengutamakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, adalah salah satu desa dengan potensi sosial dan ekonomi yang luar biasa. Namun, masyarakat masih kurang terlibat dalam penyusunan RKPDes. Hasil observasi awal dan kerja sama dengan Pemerintah Desa Wangandalem dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes membuat lokasi ini dipilih.

Panduan fasilitasi Musyawarah Desa (Musdes) berbasis kelompok dan modul pelatihan penyusunan RKPDes partisipatif adalah alat utama yang digunakan dalam kegiatan ini. Observasi dilakukan selama pelatihan KPMD dan Musdes. Gambar 1 menunjukkan alur pelaksanaan pengabdian yang disusun dalam lima tahap.



Gambar 1. Alur Pendampingan Penyusunan RKPDes Partisipatif di Desa Wangandalem
Sumber : Penulis

Pendekatan pendampingan ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan benar-benar melibatkan peran aktif masyarakat, bukan sekadar formalitas partisipasi. Prinsip utama yang digunakan adalah menggeser posisi masyarakat dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang berdaya dan mampu menentukan arah pembangunan desa mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap kegiatan, mulai dari koordinasi awal, pelatihan teknis, fasilitasi musyawarah desa (Musdes), hingga penyusunan draft RKPDes, dirancang dengan menekankan keterlibatan kelompok rentan, seperti perempuan, pemuda, dan pelaku usaha kecil. Dengan pola ini, kapasitas lokal diperkuat agar desa memiliki kemampuan untuk melanjutkan proses partisipatif secara mandiri di tahun-tahun berikutnya, tanpa selalu bergantung pada intervensi eksternal.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim pengabdian dari Universitas Pancasakti Tegal yang tidak hanya berperan sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai katalisator transformasi sosial. Supervisi langsung oleh penulis memperkuat dimensi akademik sekaligus praktik, karena penulis berperan dalam

merancang strategi intervensi, memberikan pelatihan hukum dan teknis, serta membangun pola komunikasi dialogis yang mendorong warga untuk berpikir kritis. Kolaborasi dengan mitra lokal, dalam hal ini Pemerintah Desa Wangandalem, memungkinkan kegiatan ini berjalan lebih kontekstual karena selaras dengan kebutuhan desa dan realitas sosial setempat. Keterlibatan mitra lokal juga menjamin keberlanjutan hasil, karena aparat desa ikut membangun rasa memiliki terhadap proses partisipatif tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen RKPDes yang lebih inklusif dan representatif, tetapi juga menumbuhkan budaya musyawarah partisipatif yang dapat diwariskan sebagai praktik berkelanjutan di Desa Wangandalem.

Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Partisipasi Warga dan Efektivitas Fasilitas Musdes.

Tidak hanya partisipasi warga dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang meningkat, tetapi juga kehadiran fasilitasi aktif yang memungkinkan diskusi terbuka dan inklusif. Selama Musdes RKPDes Desa Wangandalem, ada fasilitator yang memahami prinsip deliberatif, baik dari akademisi maupun Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Adanya fasilitator ini telah menciptakan ruang diskusi yang lebih adil. Sebuah forum partisipatif yang memungkinkan kelompok perempuan, pemuda, dan pelaku usaha mikro untuk menyampaikan ide secara terbuka telah berubah menjadi diskusi yang sebelumnya didominasi oleh elit lokal.



Gambar 2. Partisipasi Warga dalam Musyawarah Desa
Sumber : Penulis, 2025

Teori demokrasi partisipatif tentang komunikasi deliberatif menekankan interaksi horizontal dalam proses pengambilan keputusan kolektif (Dryzek, 2000). Kehadiran fasilitator independen dalam Musdes terbukti mampu mengurangi bias struktural dan meningkatkan kualitas hasil musyawarah (Megawati et al., 2024). Selain itu, atmosfer musyawarah non-hirarkis sangat penting untuk menciptakan interaksi yang setara antara warga dan perangkat desa (Rahmah et al., 2024). Hasil Musdes Wangandalem yang difasilitasi secara aktif menghasilkan draft RKPDes yang lebih bersemangat, mencakup topik pembangunan seperti pengembangan pertanian organik, pelatihan UMKM, dan infrastruktur dasar yang sebelumnya tidak muncul secara signifikan.

Partisipasi yang lebih luas dalam Musdes Wangandalem juga memperlihatkan adanya pergeseran budaya politik desa dari pola dominasi elit menuju pola deliberatif yang lebih setara. Warga yang sebelumnya pasif mulai berani menyampaikan pandangan kritis, sementara kelompok rentan mendapat ruang untuk menegosiasikan kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitasi yang tepat mampu menciptakan redistribusi kuasa dalam forum desa, sehingga keputusan pembangunan tidak lagi bersifat top-down, melainkan hasil kompromi kolektif. Lebih jauh, proses ini

memperkuat legitimasi sosial terhadap RKPDes karena aspirasi masyarakat terakomodasi dengan lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola desa.

2. Penguatan Peran KPMD dan Pemetaan Potensi Berbasis Komunitas

Peran KPMD secara strategis dalam proses pemetaan potensi desa. Selama pengabdian, KPMD berfungsi sebagai penghubung antara tim akademik dan masyarakat. Ini juga bertindak sebagai pelaksana lapangan yang mengumpulkan data berbasis komunitas dengan menggunakan metode mapping yang berpartisipasi. Metode ini mendukung ide *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang melibatkan warga sebagai aktor utama dalam menentukan kondisi sosial dan sumber daya mereka (Chambers, 1997). Dalam situasi ini, KPMD bertindak sebagai aktor pembangunan desa dengan peran reflektif dan representatif.

Terbukti bahwa partisipasi KPMD meningkatkan akurasi dan kelengkapan data dalam penyusunan RKPDes karena mereka mencatat tidak hanya aset fisik tetapi juga kondisi sosial seperti jaringan ekonomi rumah tangga, kelompok rentan, dan potensi konflik lokal. Oleh karena itu, proses perencanaan berpusat pada keadaan sosial yang sebenarnya dan tidak lagi berpusat pada administrasi dan dokumen. Studi yang dilakukan oleh Kartikawati et al. (2024) menunjukkan bahwa desa yang menggunakan teknik pemetaan komunitas cenderung menghasilkan dokumen RKPDes yang lebih realistis dan dapat diterapkan. Pemetaan yang dilakukan di Wangandalem menemukan sumber air alternatif. Kelompok UMKM baru ini belum tercatat dalam RPJMDes sebelumnya. Dalam situasi ini, KPMD bertindak sebagai aktor pembangunan desa dengan peran reflektif dan representatif.



Gambar 3. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), melakukan pendataan awal sebelum dilakukan musyawarah desa.

Sumber : Penulis, 2025

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pendampingan tidak hanya ditentukan oleh instrumen dan metode yang digunakan, tetapi juga oleh dinamika sosial lokal, termasuk peran tokoh masyarakat serta hubungan historis antara warga dan pemerintah desa. Meskipun perencanaan telah disusun secara menyeluruh, sebagian elit desa menunjukkan penolakan karena merasa khawatir akan kehilangan kendali. Kondisi ini menegaskan bahwa penerapan pendampingan partisipatif tidak selalu terbebas dari hambatan politik lokal. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan temuan yang menekankan bahwa struktur kekuasaan yang sudah mapan sering kali menjadi sumber resistensi terhadap upaya partisipasi (Subejo & Supriyanto, 2023).

Untuk mengatasi hambatan ini, pendampingan yang netral dan berbasis kepercayaan sangat penting. Dalam kasus Desa Wangandalem, komunikasi persuasif dengan fokus pada kepentingan kolektif telah terbukti dapat meredakan konflik sosial dan menciptakan ruang diskusi yang lebih terbuka. Tidak hanya alat teknis yang menentukan keberhasilan pendampingan partisipatif, tetapi juga struktur

sosial, budaya, dan kemampuan pemimpin desa. Oleh karena itu, untuk pengabdian berbasis komunitas, desain pendampingan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan lokal.

3. Peran Akademisi sebagai Katalisator Transformasi Sosial.

Akademisi memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial yang berbasis partisipasi di tingkat desa. Penulis berperan penting sebagai koordinator akademik, fasilitator hukum, dan pendamping strategis dalam kegiatan ini. Penulis membuat strategi intervensi yang menggabungkan pemberdayaan hukum, penguatan kelembagaan lokal, dan pelatihan teknis yang didasarkan pada Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020. Dr. Sanusi berfungsi sebagai perantara akademik, menghubungkan dunia akademik dengan praktik sosial masyarakat desa (Checkoway, 2001). Secara fungsional, penulis memfasilitasi diskusi kelompok terfokus (FGD), memimpin pelatihan teknis untuk penyusunan RKPDes, dan memberikan pelatihan hukum tentang hak-hak warga dalam perencanaan desa. Penulis mendorong tata kelola yang akuntabel dan prinsip deliberatif ke dalam suasana musyawarah yang dialogis.



Gambar 3. Penulis menjalankan peran sebagai Katalisator Transformasi Sosial, fasilitator hukum, dan pendamping strategis

Sumber : Penulis, 2025

Peran transformasional akademisi adalah sebagai agen perubahan yang mendorong masyarakat untuk berpikir kritis tentang struktur sosial-politik yang ada (Boyte & Kari, 2000). Selain menyediakan pelatihan dan fasilitas, kontribusi ilmiah penulis juga mencakup dokumentasi proses serta evaluasi partisipasi sebagai bagian dari pengetahuan berbasis komunitas. Dari hasil pengabdian, penulis menemukan bahwa dua masalah utama dalam perencanaan desa seperti Wangandalem adalah dominasi keputusan top-down dan kurangnya integrasi data mikro-lokal ke dalam kebijakan. Metode yang diusulkan penulis memperkaya diskusi tentang peran akademisi dalam tata kelola desa dengan menekankan aspek hukum dan keadilan sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kehadiran akademisi dalam proses perencanaan desa dapat meningkatkan kapasitas warga sekaligus memperkuat keberdayaan kelembagaan desa (Rohandi & Husain, 2022).

Dengan demikian, peran akademisi dalam konteks pendampingan desa tidak hanya berhenti pada aspek teknis maupun penyediaan pelatihan, tetapi juga mencakup fungsi strategis sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan dan praktik sosial di tingkat lokal. Kehadiran akademisi memungkinkan adanya transfer pengetahuan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta transformasi budaya politik desa menuju tata kelola yang lebih inklusif dan deliberatif. Lebih jauh, akademisi berperan sebagai katalisator yang mendorong terjadinya perubahan struktural melalui integrasi data lokal, pemberdayaan hukum, dan penguatan partisipasi warga. Hal ini menjadikan keterlibatan akademisi tidak

hanya berdampak pada keberhasilan penyusunan RKPDes yang lebih representatif, tetapi juga pada terbangunnya ekosistem sosial-politik desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Wangandalem menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan partisipatif dalam pembuatan RKPDes dapat meningkatkan partisipasi warga dan meningkatkan kapasitas aparatur desa. Masyarakat yang sebelumnya pasif mulai terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui Musyawarah Desa yang aktif dan dialogis. Proses ini memungkinkan kelompok rentan untuk memberikan suara mereka dalam perundingan, yang menghasilkan dokumen RKPDes yang lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, pemetaan potensi desa berbasis komunitas yang melibatkan KPMD secara aktif juga meningkatkan data dan menciptakan lebih banyak jalan untuk perencanaan pembangunan desa.

Akademisi, khususnya penulis memainkan peran penting sebagai katalisator transformasi sosial. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh peran beliau dalam merancang intervensi berbasis hukum pembangunan, memfasilitasi pelatihan teknis, dan membangun diskusi hukum di tingkat desa. Namun, program juga menghadapi tantangan, terutama karena pemerintah lokal menentangnya, warga tidak tahu banyak tentang perencanaan desa, dan kurangnya data dasar. Ini menunjukkan betapa pentingnya strategi pendampingan yang mempertimbangkan aspek teknis selain mempertimbangkan perubahan sosial, politik, dan budaya di dalam desa.

Kegiatan serupa harus dilanjutkan dengan sistem monitoring dan pelatihan yang lebih lanjut berbasis siklus perencanaan tahunan desa untuk melihat dinamika dan hasilnya. Untuk mendampingi desa secara berkelanjutan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan LSM lokal harus bekerja sama lebih erat. Ini terutama berlaku untuk memperkuat sistem data pembangunan desa dan meningkatkan kapasitas kader lokal. Secara akademik, kegiatan ini memberikan kesempatan untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana partisipasi memengaruhi kualitas tata kelola desa dan seberapa efektif dana yang digunakan oleh desa tersebut. Kami meminta pembaca, terutama para praktisi, pemangku kebijakan, dan akademisi, untuk menggunakan pengalaman Desa Wangandalem sebagai inspirasi untuk mengembangkan praktik pemberdayaan yang kontekstual dan berkeadilan di desa-desa lainnya..

Ucapan Terima Kasih

Tanpa bantuan dari berbagai pihak, pengabdian kepada masyarakat ini tidak akan berhasil. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Universitas Pancasakti Tegal atas kepercayaan dan dukungan pendanaan melalui skema hibah pengabdian dosen, yang merupakan dasar dari kegiatan ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, terutama Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, yang telah memberikan dukungan, akses, dan kepercayaan selama proses pendampingan penyusunan RKPDes. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan seluruh warga Desa Wangandalem yang telah terlibat aktif dalam kegiatan pelatihan, pemetaan potensi desa, dan Musyawarah Desa. Keberhasilan pengabdian ini sangat bergantung pada kontribusi, semangat, dan keterbukaan para peserta.

Daftar Pustaka

- Amane, A. P. O., Boliti, S. A., Matorang, H. D., Jayalangi, L. S., & Septiana, G. L. (2022). Pendampingan Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2023 di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 364–373. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v1i3.1003>
- Boyte, H. C., & Kari, N. N. (2000). *Renewing the democratic spirit in American politics: Civic agency and the politics of the public*. Civic Practices Network.
- Brata, J. T., Ruksanan, & Djauhar, A. . (2024). Pendampingan dan Penguatan Masyarakat dalam Perencanaan Partisipatif di Kelurahan Bungkutoko Kota Kendari. *Almufi Jurnal Pengabdian*

- Kepada Masyarakat, 4(2), 191–198. Diambil dari
<https://www.almufi.com/index.php/AJPKM/article/view/370>
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Checkoway, B. (2001). Renewing the civic mission of the American research university. *The Journal of Higher Education*, 72(2), 125–147. <https://doi.org/10.1080/00221546.2001.11777087>
- Dinas PMD Kabupaten Brebes. (2023). *Laporan Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa RKPDes*. Brebes: Pemerintah Kabupaten Brebes
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations*. Oxford University Press.
- Fardani, I., Kurniasari, N., Syaodih, E., Rochman, G. P., & Pradifta, F. S. (2023). Pendampingan rencana tata ruang desa (rtrd) berbasis perencanaan partisipatif. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 7(2), 72-84. <https://doi.org/10.35326/ppm.v7i2.3472>
- Indonesia, Peraturan Bupati Brebes Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penggunaan dan Tujuan Dana Desa.
- Indonesia, Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020. (2020). *Pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kartikawati, S. M., Roslinda, E., & Azhra, S. D. (2025). Pemetaan Potensi Desa Dengan Pendekatan Partisipatif sebagai Strategi Mewujudkan Desa Berkelanjutan. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 9(2), 2162-2171. <https://doi.org/10.31764/jmm.v9i2.29746>
- Megawati, S., Cahya Pratama, A., Hanin Sajida, R., & Rahaju, T. (2024). Community Participation in Preparing the Village Government Working Plan. *AAPA Proceedings Conference*, 975-989. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1172>
- Mustanir, A., Hamid, H., & Syarifuddin, R. N. (2019). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipatif. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 227-239. <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i3.2677>
- Pendamping Desa. Diakses melalui <https://www.pendamping-desa.com/2025/01/tujuan-dan-fungsi-kader-pemberdayaan.html?>
- Rahmah, L. A., Suci Megawati, Andy Cahya Pratama, Rania Hanin Sajida, Samad, M. A., & Syamsul, M. R. (2024). Community Participation in Preparing The Village Government Working Plan. *Journal of Social Dynamics and Governance*, 1(1), 37–50. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsdg/article/view/35640>
- Rohadi, M., & Husain, N. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Gandaria Melalui Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan RKPDes. *Devotion: Jurnal Pengabdian pada masyarakat bidang Pendidikan, Sains dan Teknologi*. 1(2), 16-22. <https://doi.org/10.37905/devotion.v1i2.13977>
- Sakir, A. R., & Ponto, I. S. (2024). Analysis of Participatory Development Implementation in Bantimurung Village, Simbang District, Maros Regency. *Journal of Social Sciences and Cultural Study*, 1(2): 94-99. <https://doi.org/10.61857/jsscs.v1i2.53>
- Subejo, S., & Supriyanto, S. (2005). *Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan (Framework of Rural Community Empowerment Towards Sustainable Development)*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 1(1), 17-32, <https://doi.org/10.55259/jiip.v1i1.333>
- Suprastiyo, A., & Musta'ana, M. (2019). Implementasi penyusunan rencana kerja (RKP) Desa (Studi di Desa Trucuk, Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2), 255-263. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v2i2.1359>
- Tamrin, S. H., Sajidin, M., Nurdiah, Rakasiwi, F., Anfas, & Bulkis. (2023). Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Yang Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Desa Betteng. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(3), 1071–1081. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i3.2943>

- Widyastuti, T. V., Soponyono, E., Hamzani, A. I., Bawono, B. T., Masdurohatun, A., & ARYANI, F. D. The Impact Of Food Law Policies On Local Community Empowerment In Indonesia's Sustainable Food Garden Program. *Indonesia Law Review*, 14(4), 1. <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol14/iss4/1/>
- Yanti, Y., & Putri, A. A. (2022). Pendampingan Penyusunan Anggaran Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Pada Desa Tegalsawah Karawang Timur Jawa Barat. *Sinar Sang Surya: Jurnal PKM*, 1(1), 14–25. <http://dx.doi.org/10.24127/sss.v6i1.1885>
- Yulianingrum, A. V., Riza, W. F., Muslim, I., & Nurfadillah, M. (2024). Pembentukan peraturan desa partisipatif bagi aparatur dan masyarakat menuju tata kelola desa yang berkeadilan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 706–715. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22220>
- Yusuf, M., Syamsir, S., Suroyo, S., & Br Sitepu, P. A. (2021). Pendampingan pemetaan potensi desa secara partisipatif di Desa Tanjung Lanjut. *Prosiding SNasPPM*, 6(1), 627–631.